

ANALISIS PEMETAAN SOSIAL, EKONOMI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
Studi Kasus: Sistem Zonasi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKpS)
pada Masyarakat Kepulauan Seribu Utara, Provinsi DKI Jakarta

Syamsu Budiyan

*Konsultan Pengembangan Masyarakat (Community Development) dan Staf Pengajar
Program Studi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo Madura*

Abstrak:

Studi pemetaan sosial dan kebutuhan masyarakat dilakukan di 3 (tiga) kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Wilayah studi adalah Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Harapan dan Kelurahan Pulau Kelapa. Wilayah studi termasuk kedalam zona pemukiman Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKps). Pusat Kecamatan terdapat diantara Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, sementara itu pusat pemerintahan kabupaten terdapat di Pulau Pramuka yang termasuk ke wilayah Kelurahan Pulau Panggang.

Hasil pemetaan profil kondisi wilayah dan sosial ekonomi menunjukkan bahwa wilayah studi masih memiliki ketergantungan sumber pendapatan pada sumberdaya alam pesisir terutama perikanan dan pariwisata. Kondisi wilayah penangkapan ikan tidak cukup baik karena wilayah studi merupakan tujuan wilayah penangkapan nelayan lokal dan nelayan dari luar seperti Jakarta dan Tangerang. Kompetisi penangkapan ikan di wilayah <4 mil tinggi. Pada saat survey dilakukan masih terdapat nelayan dari Pulau Panggang dan Pulau Harapan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang secara hukum yaitu jaring muroami. Selain kegiatan perikanan tangkap, diwilayah studi juga berkembang kegiatan budidaya laut yaitu Keramba Jaring Apung (KJA) yang dikelola oleh secara individu, kelompok maupun oleh perusahaan.

Profil kebutuhan menggambarkan kebutuhan masyarakat di desa-desa studi terutama yang terkait dengan ketersediaan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang perlu mendapatkan perhatian yaitu kebutuhan terhadap pendidikan formal, sampah, kepadatan penduduk, kebutuhan nelayan dan sarana publik tambahan. Fasilitas pendidikan tersedia cukup memadai, namun yang menjadi kendala adalah jika ingin melanjutkan pendidikan pada tingkat SLTA siswa harus tinggal di Pulau Pramuka hal ini tentu saja menimbulkan biaya tambahan. Fasilitas kesehatan di wilayah studi sudah tersedia dari tingkat poskes, pukesmas sampai rumah sakit.

**Perkembangan Kawasan Konservasi
Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu
(TNKpS)**

Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKpS) merupakan salah satu dari 6 (enam) taman nasional laut di Indonesia dan merupakan satu-satunya Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional yang terletak di ibukota negara Indonesia. Pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dilaksanakan

oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu (BTNKpS) sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: PM.03/MENHUT-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional. Dalam pengelolaannya, kawasan TNKpS dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN), yaitu: SPTN Wilayah I Pulau Kelapa, SPTN Wilayah II Pulau

Harapan dan SPTN Wilayah III Pulau Pramuka.

Wilayah TNKpS terletak di utara Jakarta, secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Merupakan kawasan perairan laut sampai batas pasang tertinggi. Kawasan TNKpS meliputi tiga kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan. Kawasan ini terbentang seluas 107.489 ha (SK. Menteri Kehutanan Nomor 6310/Kpts-II/2002) yang secara geografis terletak pada 5°24' - 5°45' LS dan 106°25' - 106°40' BT, termasuk kawasan darat Pulau Penjaliran Barat dan Pulau Penjaliran Timur seluas 39,50 hektar.

Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) tersusun oleh ekosistem pulau-pulau sangat kecil dan perairan laut dangkal, yang terdiri dari gugus kepulauan dengan 78 pulau sangat kecil, 86 gosong dan hamparan laut dangkal pasir karang pulau sekitar 2.136 hektar (Reef flat 1.994 ha, Laguna 119 ha, Selat 18 ha dan Teluk 5 ha). Terumbu karang tipe *fringing reef*, mangrove dan Lamun bermedia tumbuh sangat miskin hara/lumpur, dan kedalaman laut dangkal sekitar 20-40 m. Dari 78 pulau yang berada di dalam kawasan TNKpS, diantaranya 20 pulau sebagai pulau wisata, 6 pulau sebagai hunian penduduk dan sisanya dikelola perorangan atau badan usaha.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

6310/Kpts-II/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu seluas 107.489 (Seratus tujuh empat Ratus delapan puluh sembilan) hektar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta mengamanatkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. TNKpS ditetapkan karena memiliki keunikan dan keindahan alam laut dan untuk melindungi penyu sisik, penyu hijau, kima raksasa dan biota laut langka lainnya.
2. TNKpS memiliki ekosistem pesisir yang lengkap dan mewakili perairan laut dangkal mulai dari ekosistem karang, lamun, mangrove dan pantai.

Zonasi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKpS)

Direktur Jenderal PHKA Departemen Kehutanan telah menetapkan zonasi TNKpS melalui SK Nomor: SK.05/IV-KK/2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang Zonasi Pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, mengamanatkan beberapa pengaturan zonasi pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kondisi dan fungsi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta tujuan pengelolaannya, kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dibagi atas 4 (empat) zona, yaitu: Zona Inti, Zona Perlindungan, Zona Pemanfaatan Wisata dan Zona Pemukiman.
2. Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan pulau, yang berada dalam Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, harus sesuai dengan pengaturan Zonasi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, yaitu : Zona Inti, Zona Perlindungan Zona

Pemanfaatan Wisata dan Zona Pemukiman.

3. Zona Inti Taman Nasional (4.449 hektar) adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.
 - a. Zona Inti I (1.389 hektar) meliputi perairan sekitar Gosong Rengat dan Karang Rengat pada posisi geografis 5°27'00" - 5°29'00" LS dan 106°36'00" BT yang merupakan perlindungan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan ekosistem Terumbu Karang.
 - b. Zona Inti II (2.490 hektar) meliputi perairan sekitar Pulau Penjaliran Barat dan Penjaliran Timur dan Perairan sekitar Pulau Peteloran Timur, Peteloran Barat, Buton dan Gosong Penjaliran, pada posisi 5°26'36" - 5°29'00" LS dan 106°36'00" BT yang merupakan perlindungan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Hutan Mangrove.
 - c. Zona Inti III (570 hektar) meliputi perairan sekitar Pulau Kayu Angin Bira, Belanda dan Bagian utara Pulau Bira Besar, pada posisi 5°36'00" - 5°37'00" LS dan 106°33'36" - 106°36'42" BT yang merupakan perlindungan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan Terumbu Karang.

Pengelolaan dalam zona inti hanya dapat dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendidikan, penelitian dan penunjang budidaya.
- b. Monitoring SDA hayati dan ekosistemnya.
- c. Membangun sarana prasarana untuk monitoring yang tidak merubah bentang alam.

4. Zona Perlindungan Taman Nasional (26.284,50 hektar) adalah bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti taman nasional. Zona Perlindungan meliputi perairan sekitar Pulau Dua Barat, Dua Timur, Jagung, Gosong Sebaru Besar, Rengit dan Karang Mayang pada posisi geografis 5°24'00" - 5°30'00" LS dan 106°25'00" - 106°40'00" BT dan daratan Pulau Penjaliran Barat dan Penjaliran Timur seluas 39,5 hektar. Pengelolaan dalam zona perlindungan dapat dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan, penelitian, wisata terbatas dan penunjang budidaya
 - b. Membangun sarana prasarana untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas yang tidak merubah bentang alam.
 - c. Pembinaan habitat, pembinaan populasi dan pemanfaatan jasa lingkungan.
 - d. Pemanfaatan tradisional.
5. Zona Pemanfaatan Wisata Taman Nasional (59.634,50 hektar) adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan sebagai pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Zona Pemanfaatan Wisata meliputi perairan sekitar Pulau Nyamplung, Sebaru Besar, Sebaru Kecil, Lipan, Kapas, Bunder, Karang Baka, Hantu Timur, Hantu Barat, Gosong Laga, Yu Barat/Besar, Yu Timur, Satu/Saktu, Kelor Timur, Kelor Barat, Jukung, Semut Kecil, Cina, Semut Besar, Sepa Timur/Kecil, Sepa Barat/Besar, Gosong Sepa, Melinjo, Melintang Besar, Melintang Kecil, Perak, Kayu Angin Melintang, Kayu Angin Genteng, Panjang, Kayu Angin Puti, Tongkeng, Petondan Barat/Pelangi, Putri Kecil/Timur, Putri Barat/Besar, Putri Gundul, Macan Kecil, Macan

Besar/Matahari, Genteng Besar, Genteng Kecil, Bira Besar, Bira Kecil, Kuburan Cina, Bulat, Karang Pilang, Karang Ketamba, Gosong Munggu, Kotok Besar dan Kotok Kecil, pada posisi geografis 5°30'00" - 5°38'00" LS dan 106°25'00" - 106°33'00" BT.

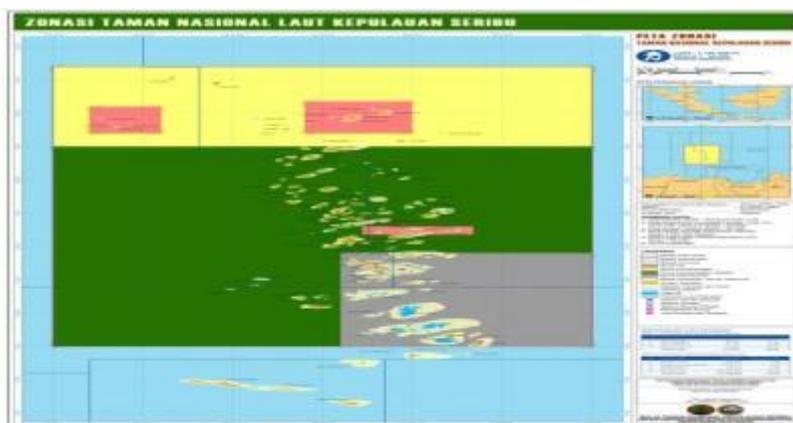
Pengelolaan dalam Zona Pemanfaatan Wisata, dapat dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan kawasan dan potensi dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam/bahari.
 - b. Pengusahaan wisata alam /bahari oleh dunia usaha.
 - c. Penangkaran jenis untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan restocking.
 - d. Membangun sarpras pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam/bahari yang tidak merubah bentang alam.
 - e. Pembinaan habitat, pembinaan populasi dan pemanfaatan jasa lingkungan.
 - f. Pemanfaatan tradisional.
6. Zona Pemukiman Taman Nasional (17.121 hektar) adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan perumahan penduduk/masyarakat.

Zona Pemukiman meliputi perairan sekitar Pulau Pemagaran, Panjang Kecil, Panjang, Rakit Tiang, Kelapa, Harapan, Kaliage Besar, Kaliage kecil, Semut, Opak Kecil, Opak Besar, Karang Bongkok, Karang Congkak, Karang Pandan, Semak Daun, Layar, Sempit, Karya, Panggang dan Pramuka pada posisi geografis 5°38'00" - 5°45'00" LS dan 106°33'00" - 106°40'00" BT.

Pengelolaan dalam Zona Pemukiman dapat dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan kawasan dan potensi dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam/bahari.
- b. Pengusahaan wisata alam/bahari oleh dunia usaha.
- c. Penangkaran jenis untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan restocking.
- d. Membangun sarpras pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam/bahari, yang tidak merubah bentang alam.
- e. Pembinaan habitat dan pembinaan populasi serta pemanfaatan jasa lingkungan.
- f. Pemanfaatan tradisional.
- g. Budidaya kelautan alami tradisional.



Gambar: Peta Zonasi Taman Nasional Kepulauan Seribu

Sejarah Komunitas
Kepulauan Seribu
Utara

Ada beberapa versi cerita mengenai sejarah penduduk asli di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Versi pertama menyebutkan bahwa penduduk asli di wilayah ini merupakan percampuran dari kelompok etnik Mandar dengan kelompok etnik Betawi. Versi lain cerita yang ada di masyarakat menyebutkan bahwa penduduk asli di wilayah ini merupakan percampuran dari kelompok etnik Bugis dengan kelompok etnik Betawi.

Kedua versi cerita tersebut memiliki kesamaan, yaitu generasi pertama kelompok etnik Mandar dan Bugis sama-sama menikah dengan kelompok etnik Betawi. Kelompok etnik Betawi ini sendiri berasal dari wilayah pesisir utara Tangerang, seperti Mauk dan Kronjo. Warga Kepulauan Seribu Utara menyebut kelompok etnik Betawi ini sebagai orang Banten. Penduduk asli sendiri agak kesulitan menyebutkan identitas etnik mereka. Ada yang menyebut diri mereka sebagai kelompok etnik Mandar, Bugis, Banten, dan ada juga yang menyebut ketiga kelompok tersebut sebagai identitas diri mereka. Versi cerita mengenai sejarah penduduk asli Kepulauan Seribu Utara yang lebih banyak dipahami oleh masyarakat adalah cerita versi pertama. Cerita sejarah penduduk asli Kepulauan Seribu Utara yang akan dijabarkan dalam tuisan ini juga merupakan cerita versi pertama yang lebih banyak dipahami oleh warga di wilayah ini.

Generasi pertama kelompok etnik Mandar datang dan menetap di Kepulauan Seribu pada zaman penjajahan Belanda. Kelompok ini

merupakan pelaut yang mencari penghidupan baru di daerah ini. Pulau yang dihuni ketika itu hanya Pulau Panggang, Pulau Pelemparan (sekarang namanya menjadi Pulau Harapan), dan Pulau Tidung. Pulau Panggang dan Pulau Harapan saat ini masuk wilayah administratif Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan Pulau Tidung masuk wilayah administratif Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Pulau-pulau lain selain ketiga pulau tersebut ketika itu merupakan pulau kosong yang tidak berpenghuni.

Setelah menetap di Kepulauan Seribu, Orang-orang Mandar banyak berhubungan bisnis dengan daerah Tangerang Utara. Mereka menjual hasil ikan ke daerah Mauk dan Kronjo. Selain menjual ikan, mereka juga membeli bahan-bahan kebutuhan hidup di daerah ini. Dalam hubungan perdagangan ini, banyak orang-orang Mandar yang bertemu jodoh mereka di daerah tersebut. Banyak laki-laki Mandar yang menikah dengan perempuan dari daerah Mauk dan Kronjo. Setelah menikah, mereka kemudian menetap dan berkembang di Kepulauan Seribu.

Pada masa berikutnya, banyak juga kelompok etnik yang datang dan menetap di Kepulauan Seribu. Kelompok etnik tersebut antara lain Bugis, Madura, Sunda, Jawa, Melayu, Minangkabau, dan termasuk kelompok etnik Mandar yang datang setelah generasi pertama. Kelompok-kelompok etnik tersebut datang secara bertahap dan berkelanjutan. Kelompok etnik Bugis merupakan salah satu kelompok etnik terbesar di wilayah ini selain kelompok etnik Mandar.

Sekitar tahun 1959, terjadi gelombang besar kedatangan kelompok

etnik Bugis di Kepulauan Seribu. Kelompok ini datang dari daerah Bone, Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Mereka meninggalkan kampung halaman dan datang ke wilayah Kepulauan Seribu karena alasan keamanan, di mana saat itu sedang terjadi pemberontakan DI/TII di beberapa wilayah Indonesia. Kelompok etnik Bugis datang ke Kepulauan Seribu mengikuti jejak kerabat-kerabat mereka yang sudah lebih dahulu menetap di wilayah ini. Sebagian besar kelompok etnik ini tinggal dan menetap di Pulau Genteng besar, dan sebagian kecilnya menyebar di pulau-pulau yang berpenduduk. Kelompok etnik Bugis banyak tinggal di Pulau Genteng Besar sampai sekitar tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, seluruh lahan di Pulau Genteng Besar dibeli oleh seorang pengusaha dan kemudian dijadikan pulau pribadi oleh pengusaha tersebut. Setelah pulau ini menjadi pulau pribadi, sekitar 70 kepala keluarga yang ketika itu tinggal di Pulau Genteng Besar kemudian "digusur" dan harus pindah ke pulau lain. Sebagian besar warga Pulau Genteng Besar (sekitar 50 kepala keluarga) pindah ke Pulau Sabira, yang terletak di ujung utara wilayah Kepulauan Seribu. Sebagian kecil dari warga pindahan Pulau Genteng Besar memilih tinggal di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan. Mereka menimbun *gosong* di antara Pulau Kelapa dan Pulau Harapan untuk membangun rumah di sana. Warga Pulau Kelapa dan Pulau Harapan menolak kehadiran warga pindahan dari Pulau Genteng Besar tersebut. Kelompok warga pindahan ini akhirnya tinggal dan menetap di Pulau Kongsi (sekarang Pulau Kelapa Dua). Ada sekitar 20 kepala keluarga yang pertama kali tinggal di Pulau Kelapa Dua.

Saat ini, warga yang tinggal di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

sudah sangat berkembang. Mereka tinggal dan membaur dengan kelompok etnik yang berbeda. Sudah jarang warga yang hidup berkelompok menurut kelompok etnik mereka. Pernikahan antara kelompok etnik yang berbeda juga sangat umum terjadi di wilayah tersebut sejak lama.

Tradisi, Adat, Norma, dan Aturan Lokal

Tradisi yang berkembang di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara tidak membentuk suatu kesatuan budaya yang khas, namun lebih mencerminkan nilai-nilai dari kebudayaan kelompok etnik masing-masing.

Warga di wilayah ini sendiri tidak banyak melakukan praktek-praktek kebudayaan yang mewakili identitas kelompok etnik mereka. Tradisi atau adat istiadat yang masih dijalankan oleh masyarakat adalah tradisi yang berhubungan dengan daur hidup.

Tradisi tersebut antara lain upacara pernikahan, kelahiran, serta kematian sesuai dengan adat dan tradisi kelompok etnik masing-masing. Kehidupan keseharian warga di wilayah ini berdasarkan kondisi wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan dikelilingi laut, sehingga tidak lepas dari keberadaan dan fungsi laut. Kegiatan rutin sebagian besar orang tua adalah melaut untuk mencari ikan. Kegiatan melaut tidak mereka lakukan pada setiap hari Jumat. Hal tersebut terkait dengan agama Islam yang dianut oleh mayoritas warga. Hari Jumat merupakan hari ibadah (sholat Jumat) sehingga mereka menghentikan kegiatan keseharian mereka pada hari Jumat. Di saat istirahat melaut, mereka melakukan interaksi sosial di masjid serta tempat-tempat tertentu sambil

memperbaiki dan membuat jaring maupun memperbaiki perahu.

Bercampurnya masyarakat dari berbagai kelompok etnik di wilayah Kepulauan Seribu Utara membuat bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penduduk setempat menjadi khas. Interaksi masyarakat yang sudah berlangsung cukup lama menimbulkan percampuran pada bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Kekhasan bahasa tersebut terlihat pada beberapa suku kata yang digunakan, di mana terjadi pemakaian suku kata dari beberapa bahasa daerah kelompok etnik yang ada. Logat bahasa yang digunakan pun cukup khas, yaitu menyerupai logat Sulawesi (Mandar dan Bugis) namun juga bercampur dengan logat Betawi (Tangerang Utara) yang kental. Masyarakat setempat menyebut bahasa yang mereka gunakan sebagai '*bahasa pulo*'.

Tidak ada norma atau aturan adat yang berlaku di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Norma atau aturan yang berlaku di wilayah ini adalah aturan yang sesuai dengan hukum dan undang-undang NKRI. Walaupun begitu, ikatan kekerabatan yang terjadi antar pulau berpenduduk bisa dikatakan cukup erat. Eratnya hubungan kekerabatan ini menciptakan keharmonisan hubungan sosial yang mereka lakukan. Kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada sesamanya juga menimbulkan rasa aman pada masyarakat. Jarang sekali ditemukan kasus pencurian ataupun kejahatan lainnya di wilayah tersebut. Warga Kepulauan Seribu Utara juga cukup menjunjung tinggi sikap sopan santun. Sikap tersebut banyak diterapkan warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu contoh sikap tersebut yang masih terlihat ketika survey ini dilakukan adalah warga selalu

mengucapkan salam ketika berkunjung ke rumah orang lain. Warga juga sering menyapa orang yang mereka jumpai di jalan, khususnya orang tua, dan tak terkecuali para tamu atau wisatawan yang mereka jumpai.

Struktur dan Jaringan Sosial

Masyarakat Kepulauan Seribu Utara memiliki pola kekerabatan yang khas mengingat masyarakatnya merupakan percampuran dari beberapa kelompok etnik. Banyaknya masyarakat Mandar dan Bugis ke wilayah ini dilatarbelakangi oleh kebudayaan mereka. Kedua kelompok etnik ini menjadikan laut sebagai sumber kehidupan mereka. Sedangkan kehadiran masyarakat Betawi yang berasal dari daerah Tangerang Utara didasari oleh kedekatan geografisnya dengan Kepulauan Seribu.

Kondisi pulau-pulau yang jauh dari daratan dan pusat kota menyebabkan banyaknya terjadi pernikahan sesama penduduk pulau yang memiliki latar belakang kebudayaan dan etnis yang berbeda. Kelompok-kelompok etnik tersebut bertemu dengan kebudayaan yang dibawa oleh masing-masing. Hal tersebut terus berlangsung hingga saat ini, sehingga mayoritas masyarakat kebanyakan tidak membedakan diri mereka dengan yang lainnya berdasarkan identitas etnis yang melekat pada diri mereka. Mereka menganggap diri mereka sebagai '*orang pulo*'. Istilah ini mengacu kepada penduduk Kepulauan Seribu yang orang tua dan kakek-nenek mereka berasal dari kelompok etnik yang berbeda. Mereka tidak mengetahui secara pasti dari etnis mana mereka berasal.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di wilayah ini adalah sistem patrilineal

dengan mengikuti garis keturunan laki-laki. Sistem seperti ini terpengaruh dari kelompok-kelompok etnik yang ada di wilayah ini. Selain itu, agama Islam yang menjadi mayoritas juga ikut mempengaruhi sistem kekerabatan ini.

Mayoritas warga di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara beragama Islam. Hal tersebut membuat pemuka agama Islam memiliki kedudukan yang cukup tinggi di masyarakat. Pemuka agama cukup dihormati oleh masyarakat, khususnya dalam lingkup kehidupan beragama. Selain pemuka agama, status sosial seseorang dalam masyarakat juga dinilai dari modal-modal sosial lain yang didapat melalui beberapa pencapaian, seperti pendidikan, ekonomi, serta politik.

Situs Budaya

Hanya terdapat sebuah situs budaya yang ditemui di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara selama survey ini berlangsung. Situs budaya tersebut merupakan makam Habib Ali bin Ahmad bin Zein Al-Aidid yang terletak di Pulau Panggang. Habib Ali merupakan seorang ulama yang sangat dihormati oleh warga di Kepulauan Seribu.

Sekitar abad 18, ada lima orang ulama yang datang dari daerah Timur Tengah untuk berdakwah di kawasan nusantara dan Malaysia. Ulama-ulama tersebut bernama Habib Ali bin Ahmad bin Zein Al-Aidid yang berdakwah di Batavia. Habib Abdulah bin Muhsin Al-Atas yang berdakwah di daerah Keramat Empang Bogor. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor yang berdakwah di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang berdakwah di daerah Ampel, Surabaya. Yang terakhir Habib Salim Al-Atas yang berdakwah ke daerah Malaysia.

Habib Ali bin Ahmad bin Zein Al-Aidid yang datang ke wilayah Batavia berdakwah di daerah Kebon Jeruk sekitar dua tahun. Ulama ini kemudian melanjutkan dakwahnya ke wilayah utara Batavia, yaitu Pulau Panggang. Ketika itu Pulau Panggang dikenal dengan pulau yang rawan perampokan. Mayoritas penduduk di Pulau Panggang sudah beragama Islam, namun dianggap masih sangat perlu diberikan dakwah oleh sang ulama. Beliau kemudian berdakwah dan menetap bersama keluarganya di pulau ini.

Habib Ali bin Ahmad bin Zein Al-Aidid menetap dan berdakwah di Pulau Panggang sampai akhir hayatnya. Beliau meninggal pada tahun 1892 dan dimakamkan di ujung timur Pulau Panggang. Makam Habib Ali masih terus dijaga oleh keturunannya di Pulau Panggang. Sampai saat ini makam tersebut banyak dikunjungi oleh para peziarah dari hampir seluruh wilayah kepulauan seribu dan sekitarnya.

Kemampuan Tanggap Darurat

Kemampuan tanggap darurat bencana di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara belum dapat terpetakan pada saat survey ini dilakukan. Sebelum tahun 2012, belum pernah terjadi bencana alam yang menjangkau kawasan ini dalam skala yang besar. Bencana alam yang cukup besar pernah menimpa wilayah ini pada awal tahun 2012. Bencana alam tersebut adalah angin puting beliung yang melanda hampir seluruh wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Angin puting beliung ini memporak-porandakan hampir seluruh wilayah ini.

Pasca bencana alam tersebut, dilakukan pelatihan tanggap darurat bencana yang dipusatkan di Pulau Harapan. Kegiatan yang dilakukan

sebagian besar adalah pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pelatihan tersebut dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) melalui programnya yang bernama Humanitarian Relief Fund (HRF). Melalui program pelatihan tersebut, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme tanggap darurat. Sayangnya, program pelatihan ini hanya dilakukan satu kali pasca bencana puting beliung, sehingga tidak dapat diketahui bagaimana kemampuan tanggap darurat warga Kepulauan Seribu Utara.

Pola Hubungan Kemitraan

Pola hubungan kemitraan (*patron-klien*) di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara banyak terlihat dalam kegiatan perikanan. Kegiatan tersebut antara lain berupa kegiatan menangkap ikan, pembagian hasil tangkapan, serta jual beli. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut terjalin hubungan antara nelayan dengan nelayan lain, pemilik kapal (perahu) dengan anak buah kapal (ABK), serta nelayan dengan penampung ikan (*palele*). Pemilik kapal mempekerjakan ABK dengan sistem bagi hasil dalam bentuk ikan tangkapan, atau hasil penjualan ikan. Tidak ada ikatan khusus antara pemilik kapal dengan ABK. ABK bebas untuk ikut bekerja dengan pemilik kapal manapun tanpa ada perjanjian yang mengikat. Biasanya pemilik kapal akan mempekerjakan ABK berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan.

Pola hubungan kemitraan yang sedikit lebih mengikat terdapat pada

hubungan nelayan dengan *palele*. *Palele* tidak hanya bertindak sebagai pembeli hasil tangkapan nelayan, tetapi juga bisa memberi modal usaha kepada nelayan. Modal usaha yang diberikan oleh *palele* kepada nelayan tidak hanya sebatas modal untuk satu kali melaut, melainkan juga modal untuk membuat atau membeli kapal, membeli mesin kapal, serta alat tangkap. Pembuatan kapal yang dibantu modalnya oleh *palele* umumnya kapal dengan daya maksimal sekitar 6 GT (satuan daya atau kecepatan mesin kapal yang dikenal oleh masyarakat di Kepulauan Seribu Utara).

Sistem pemberian modal untuk pembelian atau pembuatan kapal ada yang dibiayai seluruhnya oleh *palele*, serta ada juga yang hanya dibiayai kekurangan modalnya. Sistem ke dua lebih banyak digunakan mengingat besarnya harga ataupun biaya pembuatan kapal serta kemampuan *palele* untuk membiayai nelayan. Pada sistem ke dua ini, biasanya kekurangan modal untuk pembelian atau pembuatan kapal yang dipinjamkan oleh *palele* bisa mencapai 50 %. *Palele* umumnya akan mengambil keuntungan (*palele* menyebutnya sebagai komisi) sekitar 10 % dari total modal yang dipinjamkan.

Nelayan yang memiliki hutang dengan *palele* akan melakukan pembayaran dengan cara menyicil. Sistem yang digunakan adalah nelayan mencicil pembayaran hutangnya melalui hasil penjualan tangkapannya kepada *palele* tersebut. Hasil penjualan tangkapan ikan sang nelayan akan langsung dipotong untuk membayar angsuran hutang beserta bunganya (keuntungan atau komisi *palele*). Pemotongan tersebut berdasarkan jumlah hasil tangkapan serta kesepakatan antara *palele* dengan si

nelayan. Bila hasil tangkapan tidak banyak, maka pembayaran hutangnya pun sedikit.

Dalam sistem pembayaran hutang tersebut, nelayan hanya akan menjual hasil tangkapannya kepada *palele* pemberi hutang sampai hutangnya lunas. Sang *palele* sendiri sebenarnya tidak mewajibkan si nelayan (yang berhutang) untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada dirinya. *Palele* hanya mewajibkan nelayan untuk membayar angsuran setiap ada hasil tangkapan. Besaran angsuran hutang disesuaikan dengan jumlah tangkapan.

Keterikatan antara *palele* pemberi hutang dengan nelayan yang berhutang terlihat pada 'etika' di antara mereka. Ada semacam 'etika' di antara nelayan dengan *palele* untuk menjual hasil tangkapan kepada *palele* yang memberi hutang. Biasanya bila ada nelayan yang memiliki hutang kepada seorang *palele*, tetapi tidak menjual hasil tangkapannya kepada *palele* tersebut, maka di kemudian hari, nelayan tersebut akan mengalami kesulitan saat meminjam uang kembali. Sang *palele* enggan untuk meminjamkan kembali uang atau modal kepada nelayan tadi. *Palele* yang lain pun juga akan enggan meminjamkan uang kepada nelayan tersebut, karena tidak mau kejadian sebelumnya terulang kepada dirinya.

Forum dan Media Komunikasi Masyarakat

Tokoh masyarakat seperti ketua RW, RT, tokoh agama, serta ketua nelayan adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Mereka dianggap yang paling tepat menyampaikan informasi bagi warganya. Suksesnya penyediaan informasi, bergantung pada kemampuan

sang penyedia informasi dalam berkomunikasi kepada warga. Kemampuan komunikasi tersebut akan berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam suatu program.

Warga biasanya bergantung pada unsur hubungan personal untuk memperoleh informasi-informasi yang bersifat umum maupun khusus. Forum yang biasanya digunakan warga dalam berkomunikasi antara lain pada saat mengobrol santai di warung, dermaga, dan tempat pelelangan ikan. Bila ada pertemuan warga biasanya akan dilaksanakan di tempat seperti balai warga, aula, mesjid, serta rumah tokoh masyarakat (RT, RW, dll.).

Permasalahan Sosial yang Menonjol

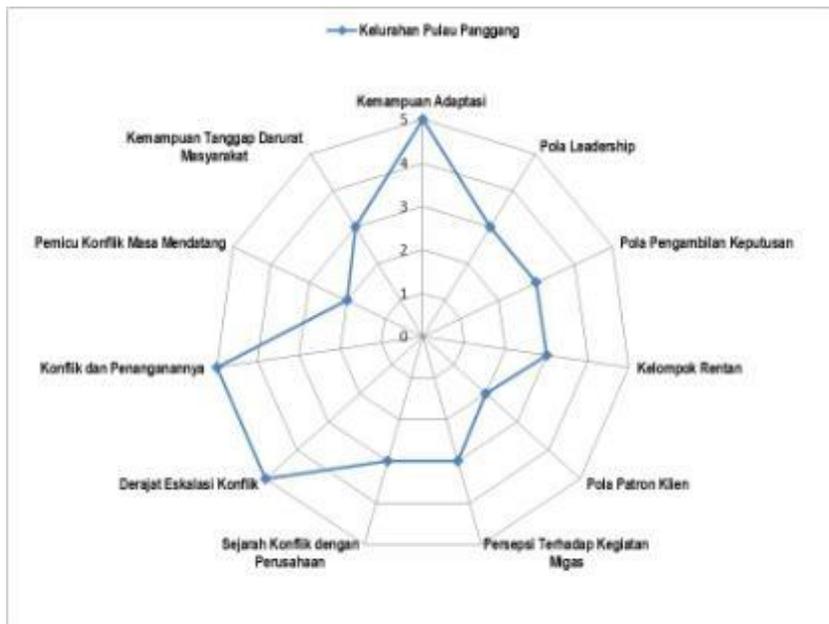
Warga Kecamatan Kepulauan Seribu Utara harus bertahan di tengah masalah kekurangan air tawar, ancaman angin puting beliung, hingga tumpukan sampah di daerah pemukiman. Hampir seluruh pulau berpenghuni di kecamatan memiliki masalah tersebut. Hanya Pulau Sabira yang tidak memiliki masalah kekurangan air tawar. Air tanah di pulau ini rasanya tawar.

Permasalahan-permasalahan tersebut masih terus diupayakan penyelesaiannya oleh berbagai pihak. Untuk kekurangan air tawar pemerintah daerah dan beberapa pihak membangun penyulingan air tanah dengan sistem Reverse Osmosis (RO) di pemukiman penduduk. Hal ini masih dinilai kurang oleh warga karena RO yang dibuat hanya dapat menyuling air tanah yang rasanya payau menjadi air tawar. Pada saat musim kemarau, air tanah semakin berkurang dan rasanya juga semakin asin. Pada kondisi tersebut, air hasil sulingan RO hanya menjadi payau dan tidak bisa menjadi tawar.

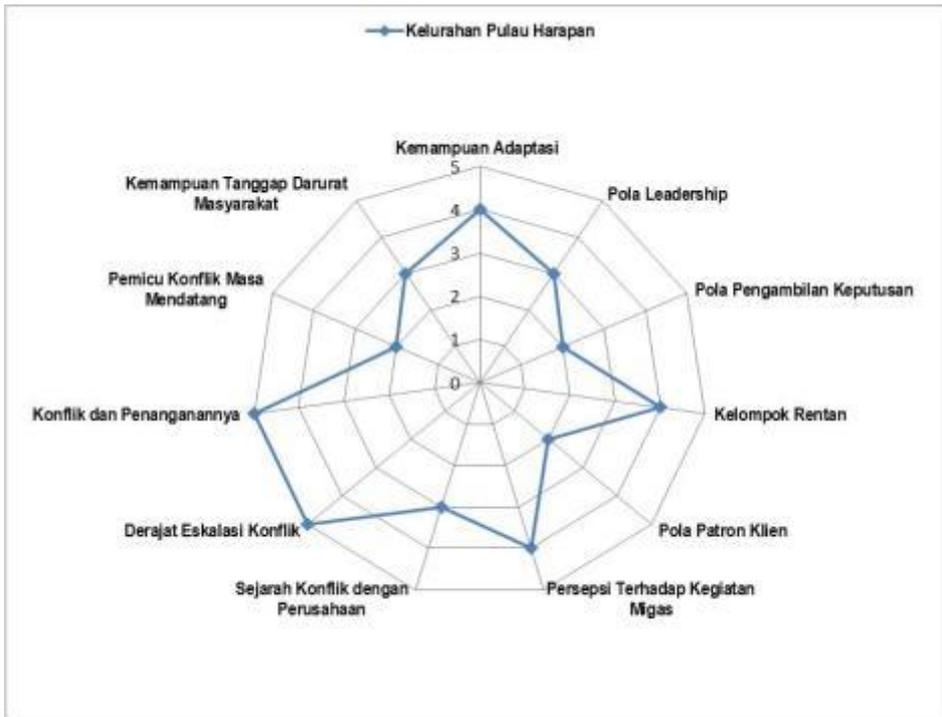
Sampah menjadi salah satu masalah sosial yang belum bisa terpecahkan di wilayah ini. Kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan masih banyak terlihat pada saat survey ini dilakukan. Kegiatan pariwisata setiap akhir pekan juga menjadi penyumbang banyaknya sampah di kecamatan ini. Beberapa pihak sudah mulai mengupayakan untuk penyelesaian ini. Salah satunya adalah rumah pengolahan sampah yang dibuat oleh TNKS (Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu) di Pulau Pramuka. Sayangnya rumah pengolahan sampah tersebut belum bisa menjadi solusi

masalah sampah ini. Pengolahan sampah ini tidak bisa menampung seluruh sampah yang ada di pulau ini, ditambah pula sampah dari kegiatan pariwisata.

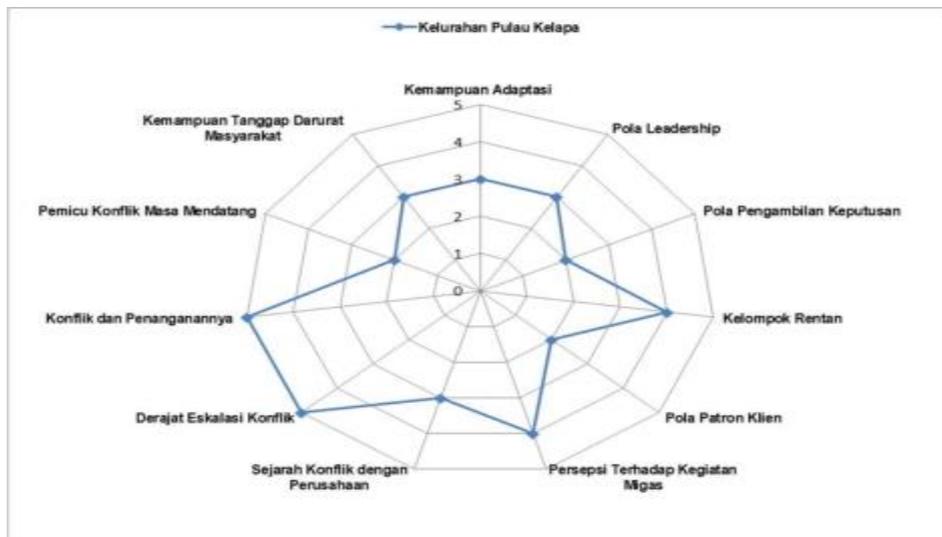
Terkait dengan pesatnya perkembangan industri pariwisata, sebagian warga mengkhawatirkan generasi remaja mereka terpengaruh oleh sisi buruk kegiatan tersebut. Kedatangan wisatawan yang membawa pengaruh buruk seperti narkoba dan pergaulan bebas bisa mengancam tatanan nilai atau norma hidup masyarakat secara umum.



Gambar: Pemetaan profil komunitas Kelurahan Pulau Panggang



Gambar: Pemetaan profil komunitas Kelurahan Pulau Harapan



Gambar: Pemetaan profil komunitas Kelurahan Pulau Kelapa

Kesimpulan

Studi pemetaan sosial dan kebutuhan masyarakat dilakukan di 3 (tiga) kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Wilayah studi adalah Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau

Harapan dan Kelurahan Pulau Kelapa. Wilayah studi termasuk kedalam zona pemukiman Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKps). Pusat Kecamatan terdapat diantara Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, sementara itu pusat pemerintahan kabupaten terdapat di

Pulau Pramuka yang termasuk ke wilayah Kelurahan Pulau Panggang.

Mata Pencaharian penduduk dominan bertumpu pada sumberdaya alam. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya laut merupakan sektor perkonomian yang menjadi andalan sebagai matapencaharian penduduk. Disamping itu, beberapa tahun belakangan ini di wilayah studi mulai berkembang kegiatan pariwisata yang menjadi alternatif matapencaharian penduduk.

Aksesibilitas ke wilayah studi dapat ditempuh dari Jakarta maupun Tangerang. Terdapat berbagai pilihan akses ke wilayah studi dengan angkutan/moda transportasi laut. Fasilitas umum di wilayah studi relatif baik, namun di belum terdapat pasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. di Kepulauan Seribu sudah terdapat lembaga perbankan yaitu Bank DKI yang terdapat di Pulau Pramuka. Semua kebutuhan pokok masyarakat diperoleh baik dari Jakarta maupun Tangerang. Fasilitas pendidikan formal di wilayah studi sudah tersedia dari tingkat SD/ sederajat sampai SLTA/ sederajat.

Profil kondisi wilayah dan sosial ekonomi mengidentifikasi beberapa komponen dasar dalam masyarakat yang terdiri dari kondisi sumberdaya alam utama berupa area penangkapan ikan, ragam alat tangkap ikan, kendala dalam penangkapan ikan, kegiatan budidaya, kondisi terumbu karang, mangrove, lamun, kerentanan, pariwisata, ketergantungan sumber pendapatan dan pendidikan formal. Hasil pemetaan profil kondisi wilayah dan sosial ekonomi menunjukkan bahwa wilayah studi masih memiliki ketergantungan sumber pendapatan pada sumberdaya alam pesisir terutama perikanan dan pariwisata.

Kondisi wilayah penangkapan ikan tidak cukup baik karena wilayah studi merupakan tujuan wilayah penangkapan nelayan lokal dan nelayan dari luar seperti Jakarta dan Tangerang. Kompetisi penangkapan ikan di wilayah <4 mil tinggi. Pada saat survey dilakukan masih terdapat nelayan dari Pulau Panggang dan Pulau Harapan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang secara hukum yaitu jaring muroami. Selain kegiatan perikanan tangkap, di wilayah studi juga berkembang kegiatan budidaya laut yaitu Keramba Jaring Apung (KJA) yang dikelola oleh secara individu, kelompok maupun oleh perusahaan.

Pemasaran hasil budidaya laut ini yaitu daerah Jakarta dan sekitarnya serta terdapat perusahaan budidaya yang sudah memasarkan hasil budidaya untuk ekspor. Kondisi tutupan terumbu karang di wilayah studi yaitu berada pada kriteria rendah sampai sedang. Kondisi lamun di wilayah studi menunjukkan bahwa di wilayah studi relatif baik berada pada kriteria sedang. Hasil pengamatan dilapangan memperlihatkan umumnya ekosistem mangrove di wilayah TNKpS terutama di zona pemanfaatan dan pemukiman merupakan ekosistem mangrove buatan. Kegiatan pariwisata berkembang di semua kelurahan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara tetapi geliat perkembangan pariwisata lebih terasa di Pulau Pramuka dan Pulau Harapan.

Menurut sejarah yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa penduduk asli di wilayah ini merupakan percampuran dari kelompok etnik Mandar dengan kelompok etnik Betawi. Versi lain cerita yang ada di masyarakat menyebutkan bahwa penduduk asli di wilayah ini merupakan percampuran dari kelompok

etnik Bugis dengan kelompok etnik Betawi. Tradisi yang berkembang di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara tidak membentuk suatu kesatuan budaya yang khas, namun lebih mencerminkan nilai-nilai dari kebudayaan kelompok etnik masing-masing.

Pola hubungan kemitraan (*patron-klien*) di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara banyak terlihat dalam kegiatan perikanan. Kegiatan tersebut antara lain berupa kegiatan menangkap ikan, pembagian hasil tangkapan, serta jual beli. Warga Kecamatan Kepulauan Seribu Utara harus bertahan di tengah masalah kekurangan air tawar, ancaman angin puting beliung, hingga tumpukan sampah di daerah pemukiman.

Profil komunitas memberi penekanan pada beberapa komponen yaitu kemampuan adaptasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kelompok rentan, konflik dan persepsi. Pada umumnya masyarakat memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Sebagai wilayah kelurahan, pemimpin cenderung bisa menerima saran, pendapat, kritik, tetapi pengambilan keputusan sepenuhnya di tangan pemimpin. Kondisi ini dikarenakan kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Seorang lurah ditunjuk oleh gubernur dan menjalankan kepemimpinannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pola pengambilan keputusan umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Bila ada keputusan yang akan diambil oleh warga, umumnya akan diadakan musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat. Kelompok rentan di wilayah studi adalah kelompok rentan secara ekonomi dan kelompok rentan secara moral.

Daftar Pustaka

Konflik yang ada di Kelurahan Pulau Panggang umumnya adalah konflik antara sesama warga itu sendiri. Konflik tersebut antara lain adalah perselisihan antara sesama warga atau tetangga perihal lahan dan perselisihan nelayan lokal dengan nelayan dari luar Kepulauan Seribu yang menangkap ikan di perairan Kepulauan Seribu juga cukup sering terjadi. Di Pulau Harapan dan Pulau Kelapa hampir sama yaitu terdapat perselisihan antara para tokoh masyarakat yang relatif senior dengan tokoh-tokoh muda. Ada beberapa pemicu konflik mendatang diantaranya yaitu konflik lahan hunian, ketidakmerataan pembagian bantuan kepada masyarakat ataupun nelayan, Persaingan antara satu ormas dengan ormas, Kegiatan pariwisata dengan persaingan tidak sehat para pemilik *homestay* dalam usaha mendapatkan tamu merupakan salah satu pemicu konflik.

Profil kebutuhan menggambarkan kebutuhan masyarakat di desa-desa studi terutama yang terkait dengan ketersediaan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang perlu mendapatkan perhatian yaitu kebutuhan terhadap pendidikan formal, sampah, kepadatan penduduk, kebutuhan nelayan dan sarana publik tambahan. Fasilitas pendidikan tersedia cukup memadai, namun yang menjadi kendala adalah jika ingin melanjutkan pendidikan pada tingkat SLTA siswa harus tinggal di Pulau Pramuka hal ini tentu saja menimbulkan biaya tambahan. Fasilitas kesehatan di wilayah studi sudah tersedia dari tingkat poskes, pukesmas sampai rumah sakit. (sby)

BPS Pusat. 2012. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dalam Angka, 2011. Katalog BPS: 1102001.3101.020. Jakarta

BPS Pusat. 2013. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dalam Angka, 2012. Katalog BPS. Jakarta

BPS Pusat. 2014. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dalam Angka, 2013. Katalog BPS. Jakarta

BPS Pusat. 2012. DKI Jakarta dalam Angka, 2011. Jakarta

BPS Pusat. 2013. DKI Jakarta dalam Angka, 2012. Jakarta

BPS Pusat. 2014. DKI Jakarta dalam Angka, 2013. Jakarta

Direktur Jenderal PHKA Departemen Kehutanan. 2004. *Surat Keputusan (SK) Zonasi TNKpS Nomor: SK.05/IV-KK/2004, tanggal 27 Januari 2004 tentang Zonasi Pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu*. Jakarta

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. 2012. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Wilayah Tahun 2011. Pemerintah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. DKI Jakarta

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. 2013. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Wilayah Tahun 2012. Pemerintah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. DKI Jakarta

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. 2014. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Wilayah Tahun 2013. Pemerintah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. DKI Jakarta